

**SIARAN PERS**

## **Riset Soroti Pentingnya Memperkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian Pascakonflik**

- *Konsep maskulinitas di wilayah konflik telah bergeser, namun, perempuan masih terjebak dalam peran gender tradisional sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga.*
- *Perempuan harus diberi ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.*
- *Perlindungan sosial adaptif dapat menjadi alat untuk membangun perdamaian.*

**Jakarta, 26 September 2024** — The SMERU Research Institute (SMERU) dan Sasakawa Peace Foundation menyelenggarakan From Research to Policy, forum diseminasi hasil riset<sup>1</sup> yang mengkaji bagaimana maskulinitas sebelum, selama, dan setelah konflik bersenjata memengaruhi kekuasaan dan posisi perempuan dalam masyarakat pascakonflik. Riset ini menemukan bahwa peran perempuan dalam pembangunan perdamaian sering kali terpinggirkan, padahal perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih damai dan adil. Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah penting yang berkaitan dengan maskulinitas dan kesetaraan gender dalam konflik dan pembangunan perdamaian.

### **Maskulinitas Bergeser, Ketidaksetaraan Gender Bertahan**

Riset ini dilakukan di tiga wilayah yang pernah mengalami konflik, yaitu Aceh, Maluku, dan Bangsamoro Mindanao (Filipina). Dalam presentasinya, Rizki Amalia Affiat, Co-Founder & Co-Executive Director Integral Knowledge Asia, yang terlibat dalam riset ini menyebutkan salah satu temuan riset adalah konsep maskulinitas di ketiga wilayah tersebut telah bergeser. “Selama konflik, laki-laki dan perempuan menegosiasikan peran-peran gender di ranah domestik maupun sosial akibat terbatasnya mobilitas laki-laki dan kekhawatiran akan keselamatan mereka. Hal ini menyebabkan pembagian kerja berdasarkan gender lebih cair,” terang Rizki. Namun, di sisi lain, norma ketidaksetaraan gender dan ketimpangan struktural tetap ada dan menghambat perempuan untuk memiliki peran yang lebih bermakna di ruang publik. “Khususnya redistribusi ekonomi yang timpang dan isu kesejahteraan sosial yang masih

---

<sup>1</sup> <https://www.spf.org/en/peacebuilding/publications/20240318.html>

belum diatasi serius. Hal ini diantaranya akibat paradigma pembangunan pascakonflik yang masih berpusat pada infrastruktur fisik dan ekonomi ekstraktif”

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengakui pentingnya peran perempuan dalam membangun perdamaian, khususnya dalam konteks konflik dan penanganan kekerasan. Komitmen tersebut diwujudkan lewat Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui Permenko PMK No. 5 Tahun 2021. Rina Nursanti, SH, M.Si, Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KPPPA mengatakan, KPPPA telah menjalankan beberapa strategi dalam mendorong kebijakan kesetaraan gender, partisipasi perempuan, dan perdamaian. Di antaranya bekerja sama dengan UN Women dan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia dalam menyelenggarakan Kenduri Perdamaian yang bertujuan mendorong perempuan terlibat dalam 3 bidang/pilar RAN P3AKS yaitu pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi perdamaian pada daerah yang rawan konflik. Selain itu, KPPPA menerbitkan Permen PPPA No. 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial. “Permen ini penting karena kalau pemprov sudah memasukkan P3AKS ke dalam RAD-nya, maka bisa dianggarkan dan dilaksanakan,” ujar Rina.

Konsep maskulinitas yang selama ini dominan sering kali dikaitkan dengan sifat-sifat yang tidak mendukung kesetaraan gender, seperti dominasi, kekerasan, dan pandangan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki. Menurut Lies Marcoes-Natsir, M.A., cendekiawan muslim dan aktivis feminis, konsep maskulinitas perlu dibedah ulang dari pandangan yang lebih berimbang antara laki-laki dan perempuan agar lebih pro terhadap kesetaraan gender. Selain itu, semua pemangku kepentingan, terutama pengambil kebijakan, harus lebih objektif dalam memandang peran perempuan dalam perdamaian. “Penyebutan istilah perempuan ‘turut terlibat’ atau ‘turut berpartisipasi’ itu merupakan representasi dari androsentrisme, seolah perempuan hanya sebagai *supporting*, tidak berada pada titik sentral upaya perdamaian. Penyebutan seperti itu perlu diubah. Perempuan perlu ditempatkan di titik sentral dalam upaya perdamaian konflik yang berangkat dari pengalaman mereka,” terang Lies.

### **Potensi Sistem Perlindungan Sosial Adaptif untuk Pembangunan Perdamaian Berkelanjutan**

Salah satu rekomendasi dari riset ini adalah perlunya kebijakan pemerintah yang inklusif dan adil untuk merespons konflik dan pembangunan perdamaian berkelanjutan. SMERU pernah melakukan studi<sup>2</sup> mengenai pentingnya perlindungan sosial adaptif (PSA) dalam meningkatkan ketangguhan kelompok rentan di wilayah Papua yang memiliki sejarah konflik.

Baik perlindungan sosial maupun pembangunan perdamaian sama-sama memiliki fokus membangun ketangguhan masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Peneliti SMERU, Asep Kurniawan, mengatakan, PSA diadopsi dalam konteks masyarakat yang rentan konflik karena memiliki kerangka yang lebih luas, bersifat lebih inklusif, dan dapat menjangkau horizon waktu yang lebih panjang serta berkelanjutan.

---

<sup>2</sup> <https://smeru.or.id/id/publication-id/seri-catatan-kebijakan-perlindungan-sosial-adaptif-untuk-orang-asli-papua>

“Keberadaan PSA diharapkan mampu mengatasi kerentanan masyarakat sampai ke akarnya,” tambah Asep. Melalui PSA, ada keterhubungan antara bagaimana menjalankan perlindungan sosial di masyarakat, sekaligus bagaimana perlindungan sosial yang ada bisa menjadi alat pembangunan perdamaian.

Perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sistemik. Salah satu langkah penting adalah dengan mengubah konstruksi sosial tentang gender, khususnya maskulinitas. Dalam sambutannya, Maho Nakayama, Director and Senior Program Officer Peacebuilding Program, Sasakawa Peace Foundation, mengatakan, bahkan di tingkat global, perwakilan perempuan dalam upaya perdamaian masih terbatas. Maka, dengan melibatkan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender, kita dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender yang lebih inklusif. Sebab perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui kolaborasi antara komunitas dan pemerintah yang menjunjung prinsip kesetaraan gender serta peka konflik.

===

**Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi:**

**Ratri Indah Septiana** (Kepala Bidang Komunikasi, The SMERU Research Institute)  
[rseptiana@smeru.or.id](mailto:rseptiana@smeru.or.id) | 0816-136-1514

Rizki Amalia Affiat (Co-Founder & Co-Executive Director, Integral Knowledge Asia)  
[r.affiat@ik-asia.org](mailto:r.affiat@ik-asia.org)

Materi presentasi pembicara dapat diunduh di <https://smeru.or.id/id/event-id/membentuk-masa-depan-yang-damai-dan-tangguh-diskusi-tentang-kesetaraan-gender-maskulinitas>

---

**Tentang Sasakawa Peace Foundation (SPF)**

*SPF adalah organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk membangun dunia yang lebih damai dan harmonis. SPF secara aktif melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan model tata kelola yang lebih efektif dan inklusif bagi seluruh manusia. SPF berupaya memperkuat hubungan internasional, mempromosikan pemahaman budaya, dan mendukung upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Informasi lebih lanjut tentang SPF dapat dilihat di [www.spf.org/en](http://www.spf.org/en).*

**Tentang The SMERU Research Institute (SMERU)**

*SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. SMERU juga berpengalaman dalam menjalankan penelitian kebijakan sosial dan ekonomi, termasuk kajian lingkungan hidup dan perubahan iklim dari perspektif kesejahteraan masyarakat. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).*